

BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 135 TAHUN 2008 TENTANG NOMOR KODE WILAYAH KEARSIPAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Lembaga Lain Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek maka perlu merubah Kode Wilayah Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 135 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Wilayah Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebagai Lembaga Lain Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 135 TAHUN 2008 TENTANG KODE WILAYAH KEARSIPAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Romawi IV Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 135 Tahun 2008 tentang Nomor Kode Wilayah Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 509), diubah sehingga berbunyi :

IV. INSPEKTORAT, BADAN, KANTOR, SATUAN, PERUSAHAAN DAERAH DAN LEMBAGA LAIN :

- | | |
|--|-----------|
| (1) Inspektorat | : 406.071 |
| (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | : 406.072 |
| (3) Badan Kepegawain Daerah | : 406.073 |
| (4) Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana | : 406.075 |
| (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat | : 406.076 |
| (6) Kantor Pendidikan Pelatihan Aparatur Dan Masyarakat | : 406.077 |
| (7) Kantor Perizinan dan Penanaman Modal | : 406.078 |
| (8) Kantor Lingkungan Hidup | : 406.079 |
| (9) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah | : 406.080 |
| (10) Kantor Ketahanan Pangan | : 406.081 |
| (11) RSUD dr. Soedomo | : 406.082 |
| (12) Satuan Polisi Pamong Praja | : 406.083 |
| (13) Perusahaan Daerah Air Minum | : 406.084 |
| (14) Perusahaan Daerah Aneka Usaha | : 406.085 |
| (15) PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita | : 406.086 |
| (16) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | : 406.087 |
| (17) Badan Penanggulangan Bencana Daerah | : 406.088 |
| (18) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | : 406.089 |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 25 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM :

Berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu melaksanakan pembentukan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka untuk mengantisipasi bencana, tindakan sebelum terjadinya bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuk dan digabung dengan urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat dalam sebuah lembaga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai konsekuensi logis pemisahan urusan penanggulangan bencana yang dibentuk dalam lembaga tersendiri, yakni perlunya melakukan penyesuaian terhadap lembaga sebelumnya dengan membentuk dua lembaga yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Lembaga Lain dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan, dalam rangka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, agar urusan kesatuan bangsa, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Trenggalek dapat diselenggarakan secara efektif dan profesional.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.
